

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN TOKOH AGAMA  
DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT  
UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIH DALAM  
PEMILIHAN KEPALA DESA  
(Studi Pada Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh:**

**ARISKA DEWI PERMATA SARI  
NPM: 1421020004**

**Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2020 M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN TOKOH AGAMA  
DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT  
UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIH DALAM  
PEMILIHAN KEPALA DESA  
(Studi Pada Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

**ARISKA DEWI PERMATA SARI**

**NPM: 1421020004**

**Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

Pembimbing I : Dr. Drs. KH. M. Wagianto, S.H., M.H.

Pembimbing II : Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa langsung yang dilakukan di kecamatan Baradatu Kabupaten Waykanan, tidak terlepas dari peranan para tokoh agama dalam mengoptimalkan masyarakat untuk turut aktif dalam berpartisipasi terhadap pemilihan kepala desa langsung yang dilakukan. Salah satu tujuan terpenting dalam pemilihan kepala desa adalah memilih pemimpin yang berkualitas. Kualitas pemimpin itu dapat diukur oleh berbagai instrumen seperti tingkat pendidikan dan kompetensi.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana peran tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa di kecamatan Baradatu dan bagaimana analisis *fiqh siyasah* terhadap peran tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa di kecamatan Baradatu.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui peran tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa di kecamatan Baradatu dan untuk mengetahui analisis *fiqh siyasah* terhadap peran tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa di kecamatan Baradatu.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field Research*), dan sifat penelitian ini yaitu *deskriptif analitis*. Sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pengelolaan data yaitu, *editing*, *coding* dan sistematika data, kemudian data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan, *pertama*, Para tokoh agama mempunyai peran penting dalam pemilihan kepala desa di kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan melalui ceramah, dakwah, khotbah yang diberikan oleh tokoh agama menjelang pilkades. Adapun peran dari Para tokoh agama ini dilakukan atas dasar tanggung jawab iman terhadap masyarakat sehingga merasa penting untuk memberikan nasihat politik kepada masyarakat agar tidak terpengaruh pada *money politic* dan golput. *Kedua*, dalam perspektif *fiqh siyasah* tokoh agama disebut dengan lembaga *Ahl al-Hall wa al Aqd* yang diartikan sebagai lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Dalam hal ini peran tokoh agama dalam pemilihan kepala desa di kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan tampak sesuai dengan syari'at Islam atau *fiqh siyasah*, karena menjalankan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* melalui khotbah dan ceramah dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. 0721703260

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Pada Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)**

**Nama : ARISKA DEWI PERMATA SARI**

**NPM : 1421020004**

**Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Drs. KH. M. Wagianto, S.H., M.H.**  
**NIP. 19620111194031001**

**Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.**  
**NIP.**

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Siyasah**

**Frenki, M.Si**  
**NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. 0721 703260

**PENGESAHAN**

**Skripsi: ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Pada Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan) disusun oleh ARISKA DEWI PERMATA SARI, NPM: 1421020004, Jurusan: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal:**

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Drs. Henry Iwansyah, M.A.**

**Sekretaris : Muhammad Irfan, S.H.I. M.Sy.**

**Penguji I : Drs. Susiadi AS. M. Sos.I.**

**Penguji II : Dr. Drs. KH. M. Wagianto, S.H., M.H.**

**Penguji III : Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. H. Khairuddin, M.H.**  
**NIP. 196210221993031002**



## MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ  
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada  
kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang  
munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.  
(Q.S. Ali Imran (3) : 104).



## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kehadiran Allah swt yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dengan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Slamet Margono dan Ibundaku Wajiatik, atas ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing penulis, dengan penuh kasih dan sayang, yang selalu memberikan support sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Ita Susanti, Tri Pingit Suryani, Wulan Suciati, serta keluarga besar penulis (kakak ipar dan ponakan) yang selalu penulis sayang.
3. Sahabat-sahabat penulis, Indra Yadi, Lia Sari, Ririn, Cici, Misra yang selama ini mendukung dan menemani dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Ariska Dewi Permata Sari, dilahirkan di Setia Negara pada tanggal 10 Maret 1996, anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Slamet Margono dan Wajiatik.

Pendidikan penulis dimulai dari tingkat SDN 3 Setia Negara lulus pada tahun 2008, melanjutkan ke SMP YP 17 Baradatu, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan ke SMAN 1 Baradatu, lulus pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Program Studi Siyasah (Hukum Tatanegara) sampai sekarang.



## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Pada Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan).

Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita tergolong umatnya.

Merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu di sini, yang telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan skripsi, sebagai rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah,
3. Bapak Frenki, M. Si. selaku ketua Program Studi Siyasah.
4. Bapak Dr. Drs. H. M. Wagianto, S. H., M. H. selaku pembimbing I, dan Bapak Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I. selaku Pembimbing II, yang membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung serta guru-guru yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran selama bangku kuliah hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Angkatan 2014
8. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman semuanya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang sifatnya membangun. Akhirnya, dengan iringan ucapan terimakasih penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Semoga jerih payah semua pihak bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin.

Bandar Lampung, Februari 2020

**Ariska Dewi Permata Sari**  
**NPM. 1421020004**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN TANPA PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I     PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang .....	3
D. Fokus Penelitian .....	10
E. Rumusan Masalah .....	10
F. Tujuan Penelitian .....	10
G. Signifikasi Penelitian .....	11
H. Metode Penelitian .....	11

### **BAB II    LANDASAN TEORI**

A. <i>Fiqh Siyasah</i> .....	16
B. <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	18
C. Partisipasi Politik .....	34
D. Tokoh Agama .....	47

E. Pemilihan Kepala Desa .....	59
F. Tinjauan Pustaka .....	68

### **BAB III LAPORAN PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan .....	71
1. Sejarah Singkat Kecamatan Baradatu .....	71
2. Struktur Organisasi Kecamatan Baradatu .....	72
3. Profil Kecamatan Baradatu .....	73
B. Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Baradatu .....	83

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Baradatu .....	92
B. Analisis Fiqh Siyasah terhadap Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Baradatu.....	99

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	103
B. Rekomendasi .....	104

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Penggunaan Lahan .....	74
Tabel 2.	Pembuatan Dodol .....	75
Tabel 3.	Pembuatan Tahu Tempe .....	75
Tabel 4.	Pengolahan Susu .....	75
Tabel 5.	Industri Pertanian Dan Perkebunan .....	75
Tabel 6.	Industri Pengolahan Hasil Pertanian Dan Perkebunan .....	76
Tabel 7.	Industri Pertukangan Dan Perbengkelan .....	76
Tabel 8.	Pusat Penjualan Minyak .....	76
Tabel 9.	Industri Kerajinan .....	76
Tabel 10.	Industri Kecil Dan Menengah .....	77
Tabel 11.	Data Kependudukan .....	79
Tabel 12.	Penduduk Berdasarkan Pendidikan .....	80

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pemahaman yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca, maka perlu adanya sesuatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah : **“ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Pada Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)”**. Untuk menghindari kesalahan pemahaman judul di atas, maka perlu ditegaskan beberapa istilah penting, yang terdapat pada judul tersebut antara lain :

1. Analisis *Fiqh Siyasah*: Penyelidikan terhadap peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dilihat dari aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>1</sup>
2. Tokoh Agama : Orang yang menjadi pemimpin dalam suatu agama, seperti para Kiyai, Ulama, Pendeta, Pastur, dan lain-lain.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Prof. H.A. Djazuli, *Fiqh siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Prenada media Group, 2014), h. 35.

<sup>2</sup> Sarliti Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 95.

3. Kesadaran Masyarakat untuk menggunakan hak pilih : suatu kesadaran suatu kelompok yang telah memiliki suatu, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya untuk menggunakan hak penduduk untuk memilih. Dalam masyarakat yang demokratis, penduduk yang usianya di atas batas boleh memilih dalam pemilihan umum.<sup>3</sup>
4. Pemilihan Kepala Desa : pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>4</sup>

Berdasarkan istilah-istilah pada penegasan judul di atas, yang dimaksud dengan judul ini adalah suatu kajian menganalisis tentang peran tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa di Kecamatan Baradatu dilihat dari *fiqh siyasah*.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan penulis memilih judul ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Secara Obyektif**

Penulis ingin menganalisis tentang peran tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa di Kecamatan Baradatu, karena semakin banyaknya masyarakat yang memilih golput akibatnya kurangnya pendidikan politik.

---

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 27.

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 1 Ayat 5

## 2. Secara Subyektif

- a. Pembahasan ini cukup relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syariah, Jurusan Siyasa.
- b. Tersedianya bahan atau data dan bahan-bahan yang mendukung sehingga memudahkan penulis untuk menyelesaikannya.

## C. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut sistem Demokrasi. Demokrasi memiliki arti suatu keadaan Negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatannya berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Kekuasaan rakyat yang dimaksud sistem demokrasi adalah kekuasaan dimana rakyat berkuasa untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Pengangkatan pemimpin dalam sistem demokrasi yaitu melalui pemilihan umum.<sup>5</sup>

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara umum Pemilu yang dilaksanakan dari tingkatan atas seperti pemilihan Presiden (pemimpin negara) sampai ke tingkatan bawah seperti pemilihan kepala desa pemerintahan demokratis. Pemerintahan desa selama ini memang

---

<sup>5</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 50



menarik untuk dicermati, hal itu tidak terlepas dari adanya realitas pemilihan kepala desa yang masih dianggap sebagai media yang paling efektif untuk mewujudkan demokrasi di desa karena calon pemimpin desa dipilih secara langsung oleh masyarakat desa setempat. Desa atau sebutan lain dalam pemerintahannya dipimpin oleh kepala desa, kepala desa adalah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan, kemajuan, dan kemasyarakatan desa.<sup>6</sup>

Kedudukan kepala desa adalah sebagai kepala eksekutif dalam pemerintahan Desa. Kepala desa dalam urusan pemerintahannya dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah suatu lembaga desa yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya kepentingan masyarakat desa dan sebagai badan penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa kepada pemerintahan desa termasuk membentuk panitia pemilihan kepala desa jika masa pemerintahan kepala desa sudah berakhir. Desa diberbagai daerah di Indonesia terdapat banyak sebutan nama lain seperti Kepala Kampung, Desa, Tiuh dan Peratin.<sup>7</sup>

Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa peran tokoh dalam sebuah desa sangat menentukan pemilihan konstituen dalam pemilihan kepala desa, apalagi tokoh tersebut menjadi panutan banyak orang atau minimal dipuja karena ide-idenya atau hanya bermodal karisma yang dimiliki. Dalam proses pilkada tentunya sangat dibutuhkan peran dari para tokoh agama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, karena sesungguhnya tanpa disadari dimata

---

<sup>6</sup> *Ibid.* h. 51.

<sup>7</sup> Koswara Kartapradja, *Otonomi Daerah, Untuk Demokrasi Dan Kemendirian Rakyat* (Jakarta: PT. Candi Cipta Paramuda, 2002), h. 302

masyarakat tokoh agama merupakan sosok paling disegani dan patut untuk diteladani. Realita yang terdapat di dalam masyarakat, tokoh agama punya karisma tersendiri yang dapat mampu merubah sifat, cara pandang bahkan tingkah laku seseorang untuk menjadi yang lebih baik.<sup>8</sup>

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa langsung yang dilakukan di kecamatan Baradatu Kabupaten Waykanan, tidak terlepas dari peranan para tokoh agama dalam mengoptimalkan masyarakat untuk turut aktif dalam berpartisipasi terhadap pemilihan kepala desa langsung yang dilakukan. Salah satu tujuan terpenting dalam pemilihan kepala desa adalah memilih pemimpin yang berkualitas. Kualitas pemimpin itu dapat diukur oleh berbagai instrumen seperti tingkat pendidikan dan kompetensi.

Keberhasilan pilkada langsung tidak hanya diukur oleh penyelenggaraannya yang lancar dan damai tetapi apa yang diperoleh telah menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Tetapi bisa saja pilkada langsung dilakukan hanya untuk ajang perebutan kekuasaan melalui mekanisme voting dari suara pemilih. Sehingga, dikhawatirkan akan menghasilkan pemimpin yang hanya populer dan diterima secara luas, namun tidak mempunyai kecakapan dari kemampuan dalam mengolah daerah, sekalipun kepala daerah jabatan politis dan tidak menuntut keahlian khusus, namun kemampuan dan potensi sangat penting. Namun pilkada langsung hanya dijadikan ajang perebutan kekuasaan, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk merebut suara

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001), h. 35.

pemilih. Ada indikasi kuat masing-masing kandidat dengan segala cara yang dilarang seperti money politik hanya untuk mendapatkan dukungan.<sup>9</sup>

Fenomena perbedaan perilaku sosial politik di kalangan tokoh agama, dalam banyak hal, dipengaruhi oleh sekurang-kurangnya dua faktor yang saling mempengaruhi. Pertama, faktor posisi sosial tokoh agama yang menurut studi-studi terdahulu memperlihatkan adanya suatu kekuatan penggerak perubahan masyarakat. Studi yang dilakukan Horikoshi, misalnya menunjukkan kekuatan tokoh agama sebagai sumber perubahan sosial, bukan saja pada masyarakat pesantren tapi juga pada masyarakat di sekitarnya. Sementara Geertz, menunjukkan tokoh agama sebagai makelar budaya (cultural brokers) dan menyatakan bahwa pengaruh tokoh agama terletak pada pelaksanaan fungsi makelar ini.<sup>10</sup>

Peran merupakan suatu yang melekat pada suatu kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, dan diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan tuntutan pada kedudukannya tersebut. Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.<sup>11</sup> Tokoh agama adalah orang yang memiliki atau mempunyai kelebihan dan keunggulan dalam bidang keagamaan dan merupakan figur yang dapat diteladani dan dapat membimbing dengan apa yang diperbuat pasti akan diikuti oleh umatnya dengan taat.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia* (Surabaya: SIC, 2002), h. 127

<sup>10</sup> Badruddin Subky, *Dilema Ulama dalam Perubahan Zaman* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 79

<sup>11</sup> W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2004), h. 735.

<sup>12</sup> Abdul Aziz Al-Badari, *Hitam Putih Wajah Ulama & Penguasa* (Jakarta: Darul Falah, 2003), h. 7.

Maka peran tokoh agama dengan partisipasi politik publik mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan, sebab apabila peran dari tokoh agama semakin baik maka partisipasi politik juga akan semakin meningkat.<sup>13</sup>

Menurut bapak Burhannudin selaku tokoh agama desa Setianegara kecamatan Baradatu bahwa di kecamatan Baradatu kabupaten Way Kanan, peran tokoh agama seperti kyai dalam proses pemilihan kepala desa hanya secara kultural saja perannya dengan memberikan fatwa berupa dukungan formal melalui pengajian-pengajian, maupun even keagamaan sangat mewarnai dinamika kehidupan politik lokal. Namun ada juga tokoh agama yang tidak mendukung salah satu calon, para tokoh agama hanya memberikan fatwa sebatas pentingnya memilih seorang pemimpin demi kemajuan suatu wilayah tersebut.<sup>14</sup>

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Budi Setiawan selaku tokoh agama Kristen di desa Setianegara mengatakan bahwa menjelang pemilihan kepala desa, tokoh agama biasanya memberikan khotbah kepada jemaat dengan tujuan bahwa masyarakat harus turut aktif untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa tersebut. Menurutnya sudah menjadi tugas dan tanggung jawab tokoh agama dalam membina dan mengarahkan masyarakat ke

---

<sup>13</sup> Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan* (Yogyakarta: LKIS, 2004), h. 258.

<sup>14</sup> Burhannudin, wawancara dengan penulis, rumah bapak Burhannudin, desa Setianegara kecamatan Baradatu, 11 Januari 2020.



hal-hal yang lebih baik, dalam hal ini adalah turut aktif dalam pemilihan kepala desa.<sup>15</sup>

Islam memang tidak ada sistem politik secara spesifik akan tetapi dalam totalitas ajaran agama Islam Al-Quran dan Hadis juga mengajarkan seluruh aspek kehidupan termasuk kepemimpinan dan pengangkatan pemimpin. Islam adalah agama yang mampu menempatkan diri dalam ruang dan waktu dimana dan kapan ia berada bahkan Islam mewajibkan kepada umat muslim untuk mengangkat seorang pemimpin dalam suatu Negara yang akan mengatur kesejahteraan dan mengayomi masyarakat dalam kepemimpinannya. Pemimpin dalam Islam tidak hanya bertanggung jawab diurusan dunia saja akan tetapi juga bertanggung jawab diakhirat.<sup>16</sup>

Mengenai hukum memilih pemimpin, dalam hal ini dikalangan ulama terjadi variasi pendapat. Menurut semua ulama Sunni, Syiah dan Murjiah, mayoritas pengikut Mu'tazilah dan Khawarij, kecuali sekte Najdat, mengangkat pemimpin itu wajib hukumnya. Karena itu, akan berdosa bila meninggalkannya.<sup>17</sup>

Menurut al-Qurthubi mengangkat pemimpin merupakan perintah yang harus didengar dan ditaati, agar persatuan dapat terwujud karenanya dan

---

<sup>15</sup> Budi Setiawan, wawancara dengan penulis, rumah bapak Budi Setiawan, desa Setianegara kecamatan Baradatu, 12 Januari 2020.

<sup>16</sup> Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam* (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 37.

<sup>17</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 108.

hukum-hukumnya dapat terlaksana.<sup>18</sup> Dalil yang dipakai yaitu surat al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۚ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"(QS.al-Baqarah: 30).<sup>19</sup>

Dan berdasarkan hadis nabi yang diriwayatkan abu Hurairah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م. قَالَ : إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ )

Artinya: Dari abu Hurairah, bahwa rasulullah saw bersabda: jika ada tiga orang berpergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya. (H. R. Abu Dawud).<sup>20</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mendalami masalah ini dalam sebuah skripsi berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk

<sup>18</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, terjemahan, Fathur Rahman dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 588.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha, 2003), h. 122

<sup>20</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi, *Ensiklopedia Hadis: Sunan Abu Dawud*, Jilid V, terjemahan, Muhammad Nashiruddin al-Albani (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 357.

Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Pada Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)”.  
 Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)”.  
 Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)”.

#### **D. Fokus Masalah**

Fokus penelitian yang akan diteliti adalah Analisis *Fiqh Siyasah* peran tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa di Kecamatan Baradatu sehingga tidak akan terjadi pembahasan yang terlalu lebar dan meluas.

#### **E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Baradatu ?
2. Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah terhadap Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Baradatu?

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Baradatu.

2. Untuk mengetahui analisis Fiqh Siyasah terhadap Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Baradatu.

### **G. Signifikasi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan para pembaca khususnya bermanfaat bagi penyelenggara pemilihan kepala desa di desa pada kecamatan Baradatu, dan umumnya bagi penyelenggara pemilihan kepala desa di provinsi Lampung.

### **H. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik dilembaga organisasi-organisasi masyarakat (*sosial*), maupun lembaga pemerintah.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini dilakukan di Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

##### **b. Sifat Penelitian**

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian *deskriptif* artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta

---

<sup>21</sup> Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian*, Cet. Ke II, (Jakarta: PT Grafindo Persada 2008), h. 22

atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.<sup>22</sup> Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analisis* yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, diinprestasikan, dan kemudian di simpulkan.<sup>23</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yaitu dari Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berada di luar lapangan penelitian atau bersifat data penunjang. Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan.

## 3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari untuk kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek

---

<sup>22</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008), h. 7.

<sup>23</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Grafik Grafika Cetakan Ke 3, 2011), h. 105.

atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.<sup>24</sup>

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya dikarenakan keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Sampel yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu menggunakan *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan menentukan sendiri sampel yang diambil karena pertimbangan tertentu.<sup>25</sup> Oleh karenanya, peneliti harus benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian, kriteria yang pantas untuk dijadikan sampel pada penelitian ini adalah 21 orang:

- 1) Kepala Desa : 3 orang
- 2) Tokoh Masyarakat : 9 orang
- 3) Tokoh Agama : 6 orang
- 4) Warga Desa : 3 orang

---

<sup>24</sup> Sugiono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung, Alfabeta, 2011), h. 80.

<sup>25</sup> *Ibid.* h. 81.



#### 4. Metode Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

##### a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknis pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada obyek penelitian.<sup>26</sup> Pengumpulan data dengan observasi langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>27</sup> Observasi yang dilakukan di Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

##### b. Interview

Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil betatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>28</sup>

##### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang

---

<sup>26</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 58

<sup>27</sup> *Ibid.* h. 154

<sup>28</sup> *Ibid.* h. 154.

akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.<sup>29</sup>

## 5. Metode Pengelolaan Data

Setelah data terhimpun maka langkah selanjutnya mengolah data agar menjadi sebuah penelitian yang sempurna dengan cara yaitu:

- a. *Editing*, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen interview, apakah sudah lengkap, relevan jelas tidak berlebihan tanpa kesalahan.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu member catatan data yang dinyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari al-qur'an dan hadits, atau buku-buku literatur lainnya yang relevan dengan penelitian
- c. *Sistematisasi data*, yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan secara sistematis data yang sudah di edit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Suharimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suratan Pendekatan* (Jakarta, Rinec Cipta, 2006), h. 231.

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti , 2004), h. 26.

## 6. Analisis Data

Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan di kecamatan Baradatu kabupaten Way Kanan, yaitu berangkat dari pendapat perorangan kemudian dijadikan pendapat yang mengetahuinya bersifat umum.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), h. 42.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### **A. *Fiqh Siyasah***

##### **1. Pengertian *Fiqh Siyasah***

Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, *fiqh* berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.<sup>1</sup> Sedangkan, secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara’ (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Quran dan Sunnah). Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.<sup>2</sup>

Menurut Suyuthi Pulungan, mengemukakan definisi *siyasah* yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan *siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam* (Jakarta, Bulan Bintang: 2003), h. 591.

<sup>2</sup> T. M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta, Bulan: 2004), h. 26.

negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istikamah.<sup>3</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan, yaitu *siyasah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhinya dari kemudaratannya. Sementara *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara.

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Di antaranya ada yang membagi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersikap teknis. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyah* (peraturan perundang-undangan), *Siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter),

---

<sup>3</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002) h. 22-23.

*siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyah* (hukum perang) dan *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).<sup>4</sup>

Sementara menurut Muhammad Iqbal,<sup>5</sup> dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

- a. Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*) meliputi tentang:
  - 1) Pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyriyyah*) atau Legislatif.
  - 2) Peradilan (*qadha'iyah*) atau yudikatif.
  - 3) Administratif pemerintahan (*idariyyah*) atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri (*siyasah dauliyah*) meliputi tentang :
  - 1) Hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau hukum perdata internasional.
  - 2) Hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-'amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
  - 3) Hubungan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*)
- c. Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*).

## **B. Siyasah Dusturiyah**

*Dusturiyah* berasal dari kata “*dusturi*” yang berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata *dustur* digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama)

---

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 14.

<sup>5</sup> *Ibid.* h. 15-16.

Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).<sup>6</sup>

Lebih lanjut yang dimaksud dengan *dusturi* yaitu, “*Dusturi* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya”.<sup>7</sup> Abul A’la al-Maududi menakrifkan *dusturi* dengan, “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”.<sup>8</sup>

Berdasarkan dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata *dusturi* sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut di atas. Dengan demikian, *Siyasah dusturiyah* adalah bagian *Fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari’at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari’at yang disebutkan di dalam al-Qur’an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Bandung: Bulan Bintang, 2003), h. 54.

<sup>7</sup> A. Djazuli, *Fiqh siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 52

<sup>8</sup> *Ibid*,

<sup>9</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur’an dan* (Bandung: Bulan Bintang, 2003), h. 46-47.

*Siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>10</sup>

Sementara menurut H. A. Djazuli, *fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
4. Persoalan bai'at
5. Persoalan *waliyul ahdi*
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
8. Persoalan *wizaroh* dan perbandingannya.<sup>11</sup>

Sementara mengenai objek kajian *fiqh siyasah dusturiyah* H. A. Djazuli menjelaskan bahwa permasalahan di dalam *Fiqh siyasah dusturiyah* adalah

---

<sup>10</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* ...., h. 178

<sup>11</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah* ...., h. 73-74.



hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang adadi dalam masyarkatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsi-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>12</sup>

Kajian pertama dari *fiqh siyasah* adalah kajian *fiqh siyasah dusturiyah*. Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan *siyasah dusturiyah* adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai *tasyri'* karena secara definitive, *tasyri'* adalah kata yang diambil dari lafadz syari'ah yang artinya jalan yang lurus. Secara terminologis, *tasyri'* diartikan oleh para fuqaha sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya yang diungkapkan melalui perantaran Rosulullah saw agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berkaitan dengan masalah akidah, ahlak, dan budi pekerti. Dari syariah dalam pengertian itu, dipetik kata *tasyri'* yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidah. *Tasyri'* dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber

---

<sup>12</sup> *Ibid.* h. 73.

dari ajaran agama yang disebut dengan *tasyri' samawiy* maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya yang dinamakan dengan istilah *tasyri' wad'iyy*.<sup>13</sup>

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.<sup>14</sup> Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *Fiqh siyasah* akan tercapai.<sup>15</sup>

Berdasarkan hal-hal di ataslah *siyasah dusturiyah* dikatakan sebagai bagian dari *Fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Pemerintah dalam upaya untuk merealisasikan kemaslahatan umum, dibenarkan dan bahkan diharuskan merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum, peraturan perundangan, dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Hukum, peraturan, dan sebagainya itu dipandang sebagai hukum Islam, atau paling tidak sebagai hukum yang islami, yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi umat islam, jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 36

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam ....*, h. 154

<sup>15</sup> A. Djazuli, *Fiqh siyasah, Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah ....*, h. 47

1. Ditetapkan melalui musyawarah (*wa syawirhum bi al-amri*)
2. Tidak memperberat dan mempersulit umat (*nafy al-haraj*)
3. Menutup akibat negatif (*sad al-dzari'ah*)
4. Mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih al-ammah*)
5. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (*nash qath'i.*).<sup>16</sup>

### 1. **Khilafah**

*Khilafah* adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga kekhalifahan Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Ikatan yang mempersatukan kekhalifahan adalah Islam sebagai agama. Pada intinya, *khilafah* merupakan kepemimpinan umum yang mengurus agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi Saw. Dalam bahasa Ibn Khaldun, kekhalifahan adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan memikul da'wah Islam ke seluruh dunia. Menegakkan *khilafah* adalah kewajiban bagi semua kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Menjalankan kewajiban yang demikian itu, sama dengan menjalankan kewajiban yang diwajibkan Allah atas semua kaum muslimin. Melalaikan berdirinya kekhalifahan merupakan maksiat (kedurhakaan) yang disiksa Allah dengan siksaan yang paling pedih.<sup>17</sup>

Mengenai hukum memilih pemimpin, dalam hal ini dikalangan ulama terjadi variasi pendapat. Menurut semua ulama Sunni, Syiah dan Murjiah,

---

<sup>16</sup> Mohammad Rusfi, AL-‘ADALAH, *Validitas Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum*, Vol. XII, No 1. Juni 2014, h. 67.<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah>, diakses pada tanggal 01 Februari 2020..

<sup>17</sup> Mujaar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 204-205.

mayoritas pengikut Mu'tazilah dan Khawarij, kecuali sekte Najdat, mengangkat pemimpin itu wajib hukumnya. Karena itu, akan berdosa bila meninggalkannya.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut golongan najdat salah satu sakte Khawarij, utamanya Fathiyah Ibn Amir al-Hanafi, mengangkat pemimpin itu hukumnya mubah. Artinya, terserah pada kehendak umat atau rakyat mau melakukannya atau tidak. Umat atau rakyat tidak berdosa apabila meninggalkannya, dan tidak pula mendapat pahala bila melakukannya. Sebab tidak ada satu pun argumentasi *naqliyah* dan *aqliyah* yang memerintahkan atau melarangnya.<sup>19</sup>

Pandangan senada antara lain didukung pula oleh sebagian kecil pengikut Mu'tazilah, utamanya Abu Bakar al-Asham, Hisyam Ibn Amr al-Futidan Ubad Ibn Sulaiman, salah seorang murid Hisyam Ibn Amr al-Futi. Bahkan lebih jauh dari itu al-Asham, sebagaimana disinggung sebelumnya, berpendapat bahwa mengangkat pemimpin itu tidak perlu sama sekali bila umat manusia telah tunduk dan patuh pada peraturan dan setia pada kebenaran. Tapi bila sebaliknya, yakni melanggar peraturan dan menyimpang dari garis kebenaran yang berdampak pada timbulnya anarki, maka barulah boleh diangkat seorang pemimpin untuk meluruskannya.<sup>20</sup>

Al-Qurtubhi yang merupakan ulama Sunni menanggapi pernyataan al-Asham dan mengatakan bahwa al-Asham adalah orang yang tidak mengerti syariat, begitu juga orang-orang yang berkata seperti perkataannya dan

---

<sup>18</sup> *Ibid.* h. 108.

<sup>19</sup> *Ibid.* h. 108.

<sup>20</sup> *Ibid.* h. 108-109.

mengikuti pendapat juga madzhabnya. Menurut al-Qurthubi mengangkat pemimpin merupakan perintah yang harus didengar dan ditaati, agar persatuan dapat terwujud karenanya dan hukum-hukumnya dapat terlaksana.<sup>21</sup> Dalil bantahan atas pernyataan al-Asham diatas adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۚ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (QS.al- Baqarah: 30).<sup>22</sup>

## 2. *Imamah*

Kata *imamah* dalam wacana *fiqh siyasah*, biasanya diidentikan dengan kata *khalifah*. Keduanya menunjukan kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah *imamah* banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan istilah *khilafah* lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. Hanya saja terdapat perbedaan mendasar antara kedua aliran ini dalam memahami *imamah*. Kelompok Syi'ah memandang bahwa *imamah* merupakan bagian dari prinsip ajaran agama. Sedangkan Sunni tidak

<sup>21</sup> Al-Qurthubi, *Tafsiral-Qurthubi*, terjemahan Fathur Rahman dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 588.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha, 2003), h. 122

memandang demikian. Meskipun begitu, beberapa pemikir Sunni menggunakan terminologi *imamah* untuk pembahasan tentang *khilafah*.<sup>23</sup>

### 3. *Ahl al-Hall Wa al-Aqd*

Secara harfiah, *ahl al-hall wa al-aqd* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian *ahl al-hall wa al-aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *ahl al-hall wa al-aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *ahl al-hall wa al-aqd* ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.<sup>24</sup>

### 4. Partisipasi Politik dalam Islam

Islam tidak hanya berbicara tentang ibadah *mahdhah* dan masalah yang bersifat terbatas, melainkan berbicara juga tentang kepemimpinan, politik, Negara, dan hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin, atau antara yang berkuasa dengan yang dikuasai. Bahkan seorang pemimpin harus memegang janji, jujur, amanah dan bertanggung jawab untuk menjalankan kekuasaan nya berdasarkan kepentingan umum, itu adalah inti sari ajaran Islam yang agung.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* ...., h. 149.

<sup>24</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* ...., h. 80.

<sup>25</sup> Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam, Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani, dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 59.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup seorang diri, sesuai dengan pendapat Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada dalam bukunya, kebutuhan hidup yang beraneka ragamakan menuntutnya agar senantiasa berinteraksi dengan manusia lain. Perbedaan pendapat, ambisi, dan kepentingan masing-masing pihak yang muncul dalam proses interaksi tersebut tidak menuntut kemungkinan akan memicu lahirnya konflik, pertikaian, penindasan, peperangan dan pembunuhan atau pertumpahan darah, yang pada gilirannya nanti bisa berimplikasi pada terjadinya kehancuran total dalam berbagai dimensi kehidupan umat manusia itu sendiri untuk dapat menghindari kemungkinan terjadinya hal serupa itu dan agar kehidupan dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik, tertib, aman, damai, dan teratur, maka perlu dipilih seorang pemimpin yang akan memandu rakyat menggapai segala manfaat sekaligus menghindarkan mereka dari berbagai *mafsadat* (kerusakan).<sup>26</sup>

Politik Islam merupakan pandangan Islam dengan kekuasaan dan Negara yang melahirkan sikap dan prilaku politik serta budaya politik yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Sikap dan prilaku serta budaya politik. Partisipasi politik merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya yang sesuai dengan nilai-nilai Islami. Partisipasi politik juga diartikan sebagai keterlibatan individu maupun organisasi politik dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kemaslahatan umum di institusi politik formal maupun informal, ditingkat nasional maupun daerah beserta

---

<sup>26</sup> Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), h. 96.

seluruh aktifitasnya seperti pemilihan umum, koalisi, dan aktifitas lainnya dengan menyuarakan kebaikan dan meminimalisir keputusan yang bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>27</sup>

Asas utama partisipasi politik adalah *tahshilul mashalih* dan *taqlilul mafasid* (meraih maslahat dan mengurangi mafsadat). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: “bahwa syariat datang untuk menghasilkan masalah dan menyempurnakannya, menghilangkan *mafsadat* (kerusakan) dan meminimalisirnya. Syariat lebih mengutamakan dan menguatkan kebaikan yang lebih besar di antara dua kebaikan (jika harus memilih salah satunya) dan mendukung keburukan yang lebih ringan di antara dua keburukan (jika harus memilih salah satunya), lalu memilih dan mengambil yang paling maslahat dengan mengabaikan yang lebih rendah, dan menghilangkan yang lebih besar mudharatnya dengan menanggung resiko mengambil madharat yang lebih rendah dan ringan”.<sup>28</sup>

Seperti yang dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang

<sup>27</sup> Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2000), h. 3.

<sup>28</sup> Ahmad Sahal Hasan, “Partisipasi Politik” (On-Line), tersedia di: <http://www.dakwatuna.com/2014/03/20/48095/partisipasi-politik/amp/> (02 Februari 2020).



sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S. an-Nis: 58).<sup>29</sup>

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada manusia untuk berperan aktif dalam politik dengan demikian semua masyarakat harus berpartisipasi politik baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipercaya untuk menjadi pemimpin yang mampu menjalankan amanat rakyat yang sesuai dengan Al-Quran dan hadist. Seperti dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 38 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (Q.S. asy-Syura: 38).<sup>30</sup>

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa Allah menyerukan agar umat Islam mengesakan Allah. Menjalankan shalat fardhu lima waktu tepat pada waktunya. Apabila mereka menghadapi masalah maka harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah dalam segala urusan, selain masalah hukum yang sudah ditentukan oleh Allah swt. Karena pada dasarnya orang-orang yang berkomitmen dalam ketaatan memenuhi seruan Allah, yaitu selalu menegakan shalat dan selalu menyelesaikan urusan dengan musyawarah.

Partipasi politik dalam Islam tidak lepas menggunakan prinsip musyawarah dimana di dalam Islam dikenal dengan istilah syura' yang

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ...., h. 567.

<sup>30</sup> *Ibid.* h. 567.

berasal dari kata *syawara yusawiru* yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Jadi, *syura'* atau musyawarah dapat diartikan yaitu saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat. Adapun bagaimana cara melakukan musyawarah, Allah tidak menentukan secara rinci. Ini diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Dalam satu pemerintahan atau Negara, boleh saja musyawarah ini dilakukan dengan membentuk suatu lembaga tersendiri, seperti parlemen atau apa pun namanya.<sup>31</sup>

Penjelasan al-Qur'an tidak selamanya tegas dan terperinci, melainkan kebanyakan hanya bersifat garis besar, sehingga dibutuhkan penjelasan yang lebih lanjut dari rasul. Musyawarah termasuk perkara yang sistem dan batasannya tidak dibuat, sebagai rahmat untuk manusia bukan karna lupa. Memberikan keleluasaan kepada mereka dan memberikan hak penuh kepada mereka untuk memilih apa yang bisa diterima oleh akal dan dipahami oleh manusia, dan selama tujuannya adalah dasar musyawarah serta untuk menciptakan Undang-undang yang adil yang menyatukan rakyat bukan menceraikannya yang mengembangkan dan membangun bukan meruntuhkan dan membinasakan.<sup>32</sup>

Tujuan dari hal itu agar rakyat ikut andil dalam perkara musyawarah dan rincian partisipasi atau andilnya diserahkan kepada mereka dan perkara perincian ini pun berbeda-beda sesuai perbedaan sosial kemasyarakatan disatu masa dan satu tempat. Prinsip musyawarah bagi para pemimpin

---

<sup>31</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* ...., h. 219.

<sup>32</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005), h.73.

Negara dan para penguasa juga masyarakat merupakan tolok ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri.<sup>33</sup>

Prinsip bermusyawarah ini sudah dipraktikkan jauh sebelum Bani Umayyah. Pada masa Khulafa Al-Rasyidin terjadilah musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah tentang pemilihan khalifah. Hal itu terjadi karena Nabi Muhammad saw. tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat islam setelah beliau wafat. Beliau tampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya.<sup>34</sup>

Muhammad Ashad berpendapat bahwa *syura* tidak saja harus dijadikan kaidah musyawarah, sebagai satu asas yang diterapkan pada semua aspek kehidupan politik, tetapi harus dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari system pemerintah itu sendiri.<sup>35</sup>

Sebagaimana halnya *syura*, demokrasi juga menekankan unsur musyawarah dalam mengambil keputusan. Demokrasi yang diartikan sebagai bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagaimana di definisikan Abraham Lincoln, mengharuskan adanya partisipasi rakyat dalam memutuskan suatu permasalahan dan mengontrol pemerintah yang berkuasa. Musyawarah dapat dilakukan dalam hal apa saja asalkan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat Islam.

---

<sup>33</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* ( Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 35.

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 36

<sup>35</sup> Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007), h. 56.

*Fiqh siyasah* tidak mengharuskan bahwasanya pemilihan pemimpin harus dipilih langsung maupun secara perwakilan. Setelah Rasulullah meninggal dunia, pengembalian amanah untuk menyelesaikan masalah hukum, beralih kepada para sahabat mereka mengikuti cara-cara yang dilakukan rasul dalam penyelesaiannya, mula-mula merujuk pada al-Qur'an dan selanjutnya kepada sunah.<sup>36</sup>

Persoalan pemilihan pemimpin dan syarat pilih pun diserahkan sepenuhnya oleh ijtihad manusia, agar tetap sesuai dengan perkembangan masyarakat. Islam hanya menggariskan prinsip tentang pemilihan pemimpin dan syarat-syarat pilih harus mengabdikan kepada kemaslahatan/kepentingan rakyat dan menjamin partisipasi setiap individu di dalamnya. Al-Qur'an juga tidak memberikan petunjuk teknis bagaimana kepala pemerintahan dipilih. Juga Rasulullah saw tidak membicarakan atau menunjuk siapa yang akan menggantikannya dalam kedudukannya sebagai pemimpin umat Islam sesudahnya. Ini dipandang sebuah isyarat bahwa persoalan kepemimpinan umat diserahkan agar diselesaikan sendiri oleh umat Islam dengan musyawarah.<sup>37</sup>

Sistem musyawarah juga pernah dilakukan pada masa Khulafah Al-rasyiddin yakni Abu Bakar Ash-Shiddiq sebelum beliau meninggal pada Tahun 634 M/13 H, Abu Bakar menunjuk Umar Ibn Al-Khathab sebagai pengganti beliau. Namun Selama zaman pemerintahan Abu Bakar tidak

---

<sup>36</sup> Sayyid Muhammad Musa, *Al-Ijtihad Wa Mada Hajatina Ilaihi Haza Al-Ashr* (Mishar: Dar Al-Kutub Al-Hadisah, 1973), h. 37.

<sup>37</sup> Abdul Mun'im Salim, *Fiqh Siyasah: Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 303.

pernah meninggalkan prinsip musyawarah dalam suatu penetapan keputusan, khususnya permasalahan yang menyangkut urusan kenegaraan. Penunjukan Umar bin Khattab sebagai pengganti Abu Bakar memang merupakan suatu yang baru, tetapi perlu di catat bahwa ini dilakukan dalam bentuk rekomendasi atau saran yang diserahkan pada persetujuan ummat. Tidak ada ikatan atau paksaan sama sekali mengenai penunjukan itu dan jika berkehendak umat bisa saja menolaknya seandainya mereka menginginkannya, namun Umar adalah orang yang memiliki sifat-sifat pemimpin besar dan selama pemerintahan Abu Bakar, terlihat keperibadian Umar berkembang cepat.<sup>38</sup>

Abu Bakar menunjuk Umar sebagai Khalifah kedua setelah Ia, kemudian terpilihlah Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua pengganti Abu Bakar, meskipun Ia tidak mencalonkan diri tetapi melalui jalur musyawarah dengan para sahabat yang paling di percaya secara bersama dan kemudian menunjukkan kehendak untuk memilih Umar, kemudian keputusan itu dilemparkan kepada kaum muslim yang pada gilirannya menerima.<sup>39</sup>

Masa kepemimpinan khalifah Umar Ibn al-Khathab, Gubernur diangkat dengan mempunyai otoritas dan otonomi yang luas, mereka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pembantu khalifah. Dalam hal rekrutmen pejabat khalifah Umar terkenal sangat selektif dan mementingkan profesionalitas dan kemampuan dalam bidang tugasnya. Disamping itu

---

<sup>38</sup> Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Amzah, Cet. Ke-3, 2013), h. 103.

<sup>39</sup> *Ibid.* h. 104.

aspirasi masyarakat setempat yang berkembang juga didengar oleh Umar, dengan demikian Umar menjauhkan dengan kebijaksanaan nepotisme dan main drop-drop dari atas untuk menentukan pejabat, dalam sebuah kasus Umar pernah memecat Ammar Ibn Yasir sebagai gubernur Kuffah karena arusnya merasa tidak puas atas kepemimpinannya.<sup>40</sup>

Menurut sejarah Islam Mengenai pengangkatan kepala daerah dalam Islam, bukanlah hasil pilihan rakyat, melainkan diangkat oleh Khalifah. Dalam kitab-kitab hadits dan juga sirah bahwa kepala daerah dalam Islam dahulu selalu diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai kepala negara. Misalnya Muadz bin Jabal yang diangkat sebagai Gubernur Provinsi Yaman dan Abu Musa Al-Asyari sebagai Gubernur provinsi Zabid dan Aden. jika diukur dengan timbangan Syariah Islam, pengangkatan gubernur itu hanyalah melalui pengangkatan oleh khalifah bukan lewat cara pemilihan oleh rakyat di provinsi yang bersangkutan, bukan pula melalui cara penetapan secara otomatis sebagai jabatan yang diwariskan secara turun temurun.<sup>41</sup>

### C. Partisipasi Politik

Hak untuk berpartisipasi dalam hal pembuatan keputusan politik, untuk memberi suara, atau menduduki jabatan pemerintah pada sekitar abad 14 telah dibatasi hanya untuk sekelompok kecil orang yang berkuasa, kaya dan keturunan orang terpandang. Kecenderungan kearah partisipasi rakyat yang lebih luas dalam politik bermula pada masa *renaissance* dan reformasi abad ke

---

<sup>40</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*....., h. 58

<sup>41</sup> Suksesi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Fiqh Siyasah” (On-Line), Tersedia di: <http://digilib.uinsby.ac.id/966/5/Bab%202.pdf> (10 oktober 2018)

15 sampai abad ke 17, abad 18 dan 19. Tetapi cara-cara bagaimana berbagai golongan masyarakat (pedagang, tukang, orang-orang professional, buruh kota, wiraswasta industri, petani desa dan sebagainya), menuntut hak mereka untuk berpartisipasi lebih luas dalam pembuatan keputusan politik sangat berbeda di berbagai Negara.<sup>42</sup>

Menurut Myron Weiner seperti dikutip oleh Mas'oed, paling tidak terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik, seperti yang disampaikan Myron Weiner yaitu:

1. Modernisasi; komersialisasi pertanian, industrialisasi, urbanisasi yang mengikat, menyebarkan kepandaian baca-tulis, pengembangan media komunikasi massa.
2. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial; ketika terbentuk suatu kelas baru dan kelas menengah yang meluas dan berubah selama proses industrialisasi dan modernisasi, masalah tentang siapa yang berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik.
3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern; kaum intelektual seperti sarjana, wartawan dan penulis sering mengeluarkan gagasan dan ide kepada masyarakat umum untuk membaktikan tuntutan akan partisipasi massa yang luas dalam pembuatan keputusan politik. Dan sistem transportasi, komunikasi modern memudahkan dan mempercepat penyebaran ide dan gagasan tersebut.

---

<sup>42</sup> Mas'oed, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), h. 45.



4. Konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik, jika timbul kompetisi perebutan kekuasaan, salah satu strategi yang digunakan adalah mencari dukungan rakyat untuk melegitimasi mereka melalui gerakan-gerakan partisipasi rakyat.
5. Campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam masalah sosial, ekonomi, dan budaya, jika pemerintah terlalu menkooptasi masalah-masalah sosial masyarakat, maka lambat laun akan merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir untuk berpartisipasi.<sup>43</sup>

### 1. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan cara memilih pimpinan Negara dan secara langsung dan secara tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum atau kepala daerah, menghadiri kegiatan (kampanye), mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen dan sebagainya.<sup>44</sup>

Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat

---

<sup>43</sup> Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Struktural Fungsional* (Surabaya: Penerbit SIC, 2002), h. 130-131.

<sup>44</sup> Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik* (Semarang: Ikip Semarang Press, 2005), h. 68.

Negara atau tindakan-tindakan yang diambil mereka. Sedangkan Pemilih pemula itu sendiri ialah pemilih yang baru pertama kali ikut memilih dalam pemilihan umum (Pemilu). Mereka baru akan merasakan pengalaman pertama kali untuk melakukan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Presiden-Wakil Presiden.<sup>45</sup>

Partisipasi politik memiliki pengertian yang beragam. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya tentang partisipasi politik. Menurut Ramlan Surbakti yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang mengangkut atau mempengaruhi hidupnya.<sup>46</sup>

Menurut Miriam Budiardjo partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).<sup>47</sup> Herbert Mc Closky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan

---

<sup>45</sup> Andi Faisal Bakti, *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi* (Jakarta: Churia Press, 2012), h. 127.

<sup>46</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2007), h. 140 .

<sup>47</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 36.

secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.<sup>48</sup>

Menurut Samuel P. Huntington pengertian partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri dan sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh Negara ataupun partai yang berkuasa.<sup>49</sup>

Menurut Keith Faulks partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini meliputi keterlibatan dalam pembuatan keputusan maupun aksi oposisi, yang penting partisipasi merupakan proses aktif.<sup>50</sup>

Menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik terbagi menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternative kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan-kegiatan yang

---

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 367.

<sup>49</sup> Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 9-10

<sup>50</sup> Keith Faulks. *Sosiologi Politik* (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 226

menanti pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.<sup>51</sup>

Milbart dan Goel membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori. Pertama, apatis. Artinya, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Kedua, spectator. Artinya, orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Ketiga, gladiator. Artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat.<sup>52</sup>

Partisipasi politik masyarakat ada yang bersifat mandiri (*autonomus*) dimana individu dalam melakukan kegiatannya atas dasar inisiatif dan keinginan sendiri. Hal ini boleh jadi atas dasar rasa tanggung jawabnya dalam kehidupan politik, atau karena didorong oleh keinginan untuk mewujudkan kepentingannya atau kepentingan kelompoknya. Namun tidak jarang juga berpartisipasi yang dilakukan bukan karena kehendak individu yang bersangkutan, akan tetapi karena diminta atau digerakkan oleh orang lain dan bahkan dipaksa oleh kelompoknya. Partisipasi yang terakhir ini adalah partisipasi yang digerakkan atau sering disebut dengan *mobilized political participation*. Partisipasi politik masyarakat biasanya bersumber pada basis-basis sosial-politik tertentu. Kecuali partisipasi yang mengambil

---

<sup>51</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* ...., h. 142

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 143

bentuk *contacting*, partisipasi pada umumnya merupakan sebuah tindakan kolektif.<sup>53</sup>

Berdasarkan dari beberapa pendapat ahli tersebut maka yang dimaksud partisipasi politik adalah adanya kegiatan atau keikutsertaan warga Negara dalam proses pemerintahan. Kemudian kegiatan tersebut diarahkan untuk memengaruhi jalannya pemerintahan. Sehingga dengan adanya partisipasi politik tersebut akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka.

## **2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik**

Menurut Surbakti beberapa faktor yang menyebabkan orang mau ikut atau tidak mau ikut dalam proses politik antara lain:

### **a. Status sosial dan Ekonomi**

Status sosial adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan status ekonomi adalah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik.

### **b. Situasi**

Menurut Surbakti, situasi politik juga dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman.

---

<sup>53</sup> Afan Gaffar, *Merangsang Partisipasi Politik Rakyat*, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2002), h. 241.

c. Kesadaran politik

Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara yang menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup.

d. Kepercayaan terhadap pemerintah

Kepercayaan terhadap pemerintah adalah penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah dia menilai pemerintah dapat di percaya dan dapat di pengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan-kebijakan atau pelaksanaan pemerintahan.

e. Perangsang partisipasi melalui sosialisasi media massa dan diskusi-diskusi formal.<sup>54</sup>

Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Ramlan Surbakti menyebutkan dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya, hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 128

<sup>55</sup> Michael Rush dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 124

Menurut Myron Weimer partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Modernisasi di segala bidang akan berimplikasi pada komersialisme pertanian, industrial, meningkatkan arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas.
- b. Terjadinya perubahan kelas struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas era industrialisasi dan modernisasi.
- c. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara.
- d. Pemimpin politik yang bersaing merebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangannya dilakukan dengan cara mencari dukungan massa.
- e. Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial dan budaya. Meluasnya ruang lingkup aktivis pemerintah ini seringkali merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik.<sup>56</sup>

Sedangkan Milbrath memberikan alasan bervariasi mengenai partisipasi seseorang, yaitu:

---

<sup>56</sup> Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 30.



- a. Berkenaan dengan penerimaan perangsang politik. Milbrath menyatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media massa akan memberikan pengaruh bagi keikutseertaan seseorang dalam kegiatan politik.
- b. Berkenaan dengan karekteristik sosial seseorang. Dapat disebutkan bahwa status ekonomi, karekter suku, usia jenis kelamin dan keyakinan (agama). Karakter seseorang berdasarkan faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang relatif cukup besar terhadap partisipasi politik.
- c. Menyingkat sifat dan sistem partai tempat individu itu hidup. Seseorang yang hidup dalam negara yang demokratis, partai-partai politiknya cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa, sehingga massa cenderung berpartisipasi dalam politik.
- d. Adanya perbedaan regional. Perbedaan ini merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaan watak dan tingkah laku individu. Dengan perbedaan regional itu pula yang mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik.<sup>57</sup>

Secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi:

- a. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.

---

<sup>57</sup> *Ibid.* h. 30-31.

- b. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya mentaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
- c. Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.<sup>58</sup>

Milbrath dan Goel yang dikutip oleh Cholisin membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori yakni:

- a. Partisipasi politik apatis, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- b. Partisipasi politik spectator, orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
- c. Partisipasi politik gladiator, yaitu mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.
- d. Partisipasi politik pengkritik yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.<sup>59</sup>

Menurut Olsen partisipasi sebagai dimensi utama stratifikasi sosial. Ia membagi partisipasi menjadi enam lapisan, yaitu pemimpin politik, aktivitas politik, komunikator (orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap dan informasi lainnya kepada orang lain), warga masyarakat, kelompok marginal (orang yang sangat sedikit melakukan kontak dengan

---

<sup>58</sup> A. Rahman, *Sistem Politik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 288.

<sup>59</sup> *Ibid.* h. 289.

sistem politik) dan kelompok yang terisolasi (orang yang jarang melakukan partisipasi politik).<sup>60</sup>

Partisipasi politik juga dapat dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku yaitu individual dan kolektif. Individual yakni seseorang yang menulis surat berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Sedangkan yang dimaksud partisipasi kolektif ialah kegiatan warga negara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum. Partisipasi kolektif dibedakan menjadi dua yakni partisipasi kolektif yang konvensional yang seperti melakukan kegiatan dalam proses pemilihan umum dan partisipasi politik kolektif nonkonvensional (agresif) seperti pemogokan yang tidak sah, melakukan hura-hura, menguasai bangunan umum. Partisipasi politik kolektif agresif dapat dibedakan menjadi dua yaitu aksi agresif yang kuat dan aksi agresif yang lemah. Suatu aksi agresif dikatakan kuat dilihat dari tiga ukuran yaitu bersifat anti rezim (melanggar peraturan mengenai aturan partisipasi politik normal), mengganggu fungsi pemerintahan dan harus merupakan kegiatan kelompok yang dilakukan oleh monoelit. Sedangkan, partisipasi politik kolektif agresif yang lemah adalah yang tidak memenuhi ketiga syarat tersebut diatas.<sup>61</sup>

Dinegara-negara berkembang partisipasi politik cenderung digerakan secara meluas dan diarahkan untuk kepentingan pembangunan. Orang-orang yang melakukan demonstrasi atau memberikan suara dengan jalan tersebut

---

<sup>60</sup> Michael Michael Rush dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 76 .

<sup>61</sup> *Ibid.* h. 77.

tampaknya merupakan wujud nyata dari partisipasi politik yang mudah serta mengundang perhatian dari berbagai kalangan.<sup>62</sup>

Menurut Paige, tinggi rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan pemerintah (sistem politik menjadi empat tipe yaitu partisipasi aktif, partisipasi pasif tertekan (apatis), partisipasi militan radikal, dan partisipasi pasif.<sup>63</sup>

Partisipasi aktif, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi. Sebaliknya jika kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politiknya cenderung pasif-tertekan (apatis). Partisipasi militan radikal terjadi apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Dan apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).<sup>64</sup>

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond terbagai dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional. Rincian bentuk partisipasi politik konvensional dan non konvensional yaitu sebagai berikut:

a. Partisipasi politik konvensional

1. Pemberian suara atau voting
2. Diskusi politik
3. Kegiatan kampanye

---

<sup>62</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* ...., h. 380.

<sup>63</sup> Yalvema Miaz, *Partisipasi Politik* (Jakarta: UNP Press, 2004), h. 225.

<sup>64</sup> A. Rahman, *Sistem Politik Indonesia* ...., h. 287.

4. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
5. Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administrative
- b. Partisipasi politik nonkonvensional
  1. Pengajuan petisi
  2. Berdemonstrasi
  3. Konfrontasi
  4. Mogok
  5. Tindak kekerasan politik terhadap harta benda : pengrusakan,
  - c. pemboman, pembakaran
  6. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia seperti penculikan,
  - d. pembunuhan, perang gerilya, revolusi.<sup>65</sup>

#### **D. Tokoh Agama**

##### **1. Pengertian Tokoh Agama**

Tokoh agama adalah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat.<sup>66</sup>

Pengertian tokoh dalam bahasa Indonesia berarti “orang-orang yang terkemuka”. Mengacu pada definisi tersebut dapat diartikan bahwa tokoh Agama adalah orang- orang yang terkemuka, terpandang serta mempunyai

---

<sup>65</sup> *Ibid.* h. 288.

<sup>66</sup> Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal Itu?* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 10-11.

peran besar terhadap pengembangan ajaran Agama baik agama Islam maupun Agama yang lainnya.<sup>67</sup>

Tokoh agama dalam pandangan umum sering disebut ulama adalah orang yang mengetahui, orang terpelajar dalam salah satu ilmu pengetahuan. Ulama adalah sebuah status yang didapat oleh seseorang melalui proses belajar, di mana status ini merupakan pengakuan pihak lain terhadap lainnya. Untuk mendapatkan pengakuan ini seseorang ulama minimal harus berpengetahuan dan mempunyai pengikut atau murid.<sup>68</sup>

Tokoh agama adalah sejumlah orang Islam yang karena pengaruhnya begitu luas dan besar dalam masyarakat muslim baik pengetahuannya perjuangan menegakkan syariat Islam perilaku yang baik dan diteladani maupun kharismatik cukup disegani masyarakat.<sup>69</sup>

Ciri-ciri pemimpin informal adalah pertama tidak memiliki penunjukan formal atau legitimasi sebagai pemimpin, kedua kelompok rakyat atau masyarakat menunjuk dirinya, dan mengakuinya sebagai pemimpin. Status tokoh kepemimpinannya berlangsung selama kelompok yang bersangkutan masih mau mengakui dan menerima pribadinya, ketiga dia tidak mendapatkan dukungan atau *backing* dari suatu organisasi formal dalam menjalankan tugas kepemimpinannya, keempat biasanya tidak mendapatkan imbalan balas jasa, atau imbalan jasa itu diberikan secara sukarela, kelima tidak dapat dimutasikan, tidak pernah mencapai promosi, dan tidak memiliki

---

<sup>67</sup> Yowono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Arkolis, 2000), 83.

<sup>68</sup> Shabri dan Sudirman, *Biografi Ulama-Ulama Aceh Abad XX* (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2005), h. 2.

<sup>69</sup> Malik Bin Nabi, *Membangun Dunia Baru Islam* (Bandung: Mizan, 2004), h. 36.

atasan. Dia tidak perlu memenuhi persyaratan formal tertentu, dan keenam apabila melakukan kesalahan, dia tidak dapat dihukum, hanya saja respek orang terhadap dirinya jadi berkurang, pribadinya tidak diakui atau dia ditinggalkan oleh massanya.<sup>70</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, tokoh agama adalah seseorang yang dianggap cakap, berilmu pengetahuan yang tinggi, berakhlak mulia, mempunyai keahlian dibidang agama baik ritual keagamaan sampai wawasan keagamaan yang dapat di jadikan panutan oleh masyarakat sekitarnya.

## **2. Tugas, Peran dan Fungsi Tokoh Agama**

### **a. Tugas Tokoh Agama**

Tugas-tugas seorang tokoh agama menurut Soekanto adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan suatu kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan pegangan bagi pengikut-pengikutnya. Dengan adanya kerangka pokok tersebut, maka dapat disusun suatu skala prioritas mengenai keputusan-keputusan yang perlu diambil untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi (yang sifatnya potensial atau nyata). Apabila timbul pertentangan, kerangka pokok tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

---

<sup>70</sup> Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal Itu?....*, h. 11.

- 2) Mengawasi, mengendalikan, serta menyalurkan perilaku warga masyarakat yang dipimpinnya.
- 3) Bertindak sebagai wakil kelompok kepada dunia di luar kelompok yang dipimpinnya.<sup>71</sup>

Tugas yang wajib dikerjakan oleh setiap tokoh agama Islam dalam mengembangkan agama yaitu:

- 1) Menjadi imam shalat rawatib dan shalat jum'at.

Tokoh agama merupakan orang yang menjalankan tugas sebagai imam baik pelaksanaan shalat lima waktu maupun pada shalat jum'at.

- 2) Menyelenggarakan kegiatan ramadhan seperti shalat tarawih dan sebagainya.

Kegiatan keagamaan yang khusus dilakukan pada bulan ramadhan, seperti shalat tarawih, witr, memperingati malam Nuzul al-Qur'an, mengadakan kultum (ceramah singkat) setiap selesai shalat isya.

- 3) Mengajar mengaji.

Adanya kegiatan mengajar mengaji ini tokoh agama bisa mengembangkan dakwah secara keseluruhan. Belajar agama merupakan kewajiban bagi laki-laki maupun perempuan.

- 4) Menyelenggarakan *tajhiz* mayat.

*Tajhiz* mayat merupakan fardhu kifayah yang harus dilakukan.

Para tokoh agama menjadi orang pertama yang melaksanakan tugas

---

<sup>71</sup> Soerjano Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 256.



tersebut, dimulai dari memandikan sampai pada menguburkan orang yang meninggal dunia.

5) Menjadi 'amil zakat.

Tokoh agama merupakan orang yang menjadi 'amil zakat ataupun orang yang mengumpulkan zakat. Setiap masyarakat yang mau mengeluarkan zakat merupakan tugas tokoh agama yang menerima zakat.

6) Bersama-sama dengan dalam semua jenis kegiatan *ceremonial* masyarakat seperti pernikahan dan sebagainya sepanjangnya menyangkut kegiatan keagamaan. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat itu merupakan keharusan bagi setiap perangkat gampong khususnya tokoh agama dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.<sup>72</sup>

b. Peran Tokoh Agama

Peran (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Artinya, seorang yang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Sebagaimana kedudukan, maka setiap orang pun dapat mempunyai macam-macam peran yang hasil dari pola pergaulan hidupnya, hal tersebut berarti pula bahwa peran tersebut

---

<sup>72</sup> M. Saleh Suhaedy dan Abubakar Al Yasa', *Buku Pegangan Teungku Imuem Meunasah* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh Darussalam, 2008), h 18.

menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peran sangat penting karena dapat mengatur perilaku seseorang, disamping itu peran menyebabkan seorang dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.<sup>73</sup>

Abu Ahmadi, mendefinisikan peran sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap cara individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Setiap individu dalam masyarakat diasumsi memiliki posisi sosial. Peran yang dijalankan oleh individu ditentukan oleh posisi sosialnya. Posisi sosial seseorang, pada gilirannya, ditentukan oleh sejumlah aspek sosial, termasuk norma- norma sosial, tuntutan, dan tata aturan dari peran yang dijalankan orang lain pada posisi yang serupa, dan kapasitas serta kepribadian tertentu dari individu yang bersangkutan. Dari sini, peran kemudian dipahami sebagai hasil dari berbagai perspektif sosial, perilaku individu lain terhadap perilaku tindakan, dan variasi yang ditampilkan individu-individu lain dalam memainkan peran serupa yang dimunculkan dalam rangka kerja yang diciptakan oleh faktor-faktor di atas.<sup>74</sup>

Menurut Imam Barnawi, ada tiga peran tokoh Agama dalam membina akhlak yaitu peran kaderisasi, peran pengabdian dan dakwah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Peran kaderisasi, dimana tokoh agama mempunyai peran melaksanakan kegiatan kaderisasi ditengah masyarakat tokoh agama

---

<sup>73</sup> J. Dwi Narwoko, *Psikologi Sosial* (Surabaya: PT Bina Ilmu , 2002), h. 50.

<sup>74</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001), h. 50.

Islam dengan kemampuan yang dimiliki dituntut mampu melaksanakan kaderisasi. Melakukan kaderisasi berarti menurut tokoh agama bergabung dalam suatu wadah (pengabdian diri) yang dikelola sendiri mau pun bekerja sama dengan organisasi.

- 2) Peran pengabdian, dimana seorang tokoh agama mengabdikan diri secara langsung dalam kegiatan masyarakat. Dimana tokoh agama harus hadir ditengah-tengah masyarakat, membantu dan membimbing kearah kemajuan. Tokoh agama bertindak dalam masyarakat dalam segala belenggu kehidupan yang membaur dalam masyarakat kearah yang lebih baik. Tokoh agama harus bisa memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, bersikap yang mencerminkan pribadi muslim dan dalam setiap perilakunya dijadikan suri tauladan bagi masyarakat.
- 3) Peran dakwah, karena dakwah merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang agama dan dapat mengajak, mendorong dan memotivasi orang lain. Tokoh agama Islam berperan menangkal praktik kehidupan yang tidak benar dan meluruskan kejalan yang benar, menggunakan gagasan yang kreatif, mengenai berbagai sektor pembangunan, menemukan dan mengembangkan konsep ilmiah tentang membangun, menemukan, menyadarkan manusia tentang kehidupan masa akan datang yang lebih baik. Tokoh agama mempunyai kapasitas untuk memanusiakan manusia (proses humanisasi) melakukan penegakkan kebenaran dalam

pencegahan kemungkaran (proses liberal) dan menciptakan masyarakat berkeyakinan yang teguh.<sup>75</sup>

Tokoh agama sering kali memiliki peran ganda. Selain memimpin keagamaan, mereka juga sebagai agen pengembangan masyarakat dan tokoh kunci dalam melestarikan kekayaan tradisi untuk menciptakan tertip sosial, bahkan tidak sedikit pemuka agama sebagai panutan masyarakat juga sebagai tokoh sosial budaya, politik, pendidik dan ekonomi.<sup>76</sup>

Seorang tokoh baik formal maupun informal sebaiknya menjauhi sikap dan tutur kata yang profokatif dan mengorbankan permusuhan merupakan usaha untuk menciptakan keharmonisan, karena semua sikap dan tutur kata akan diikuti oleh pengikutnya.<sup>77</sup>

- 1) Dari perspektif pendidikan, mengadakan program pelatihan untuk orang dewasa seperti diadakannya pelatihan singkat berbasis pluralism kewargaan untuk multi keyakinan yang disatukan dalam sebuah media untuk berbagai informasi tentang persepektif agama masing-masing. Dalam tatanan sosial masyarakat yang sudah mentradisi dimasyarakat itu sendiri. Hal ini ditujukan untuk melstarikan yang baik sebagai suatu upaya untuk mencegah sekelompok individu yang bertujuan mengangkat isu keyakinan sebagai dasar kekacauan.

---

<sup>75</sup> Imam Bawani, *Cindernisasi Islam Dalam Perspektif Islam* (Surabaya: Bina Firma, 2001), h. 5

<sup>76</sup> Ahsanul Khalikin, "Pengembangan Wadah Kerukunan dan Ketahanan Masyarakat Lokal di Kecamatan Banjarmasin Tengah". *Harmoni*. Vol. 3. No. 2 (September 2017), h. 111.

<sup>77</sup> Fitri Anisa, "Kontruksi Perdamian Dalam Relasi Islam-Katolik-Sunda di Kali Minggir dan Naga Herang", *Harmoni dalam keragaman*. Vol. 4. No. 3. (Juli 2012), h. 113.

- 2) Dari perspektif sosial budaya, membangun sebuah situs (simbol) atau sebuah bangunan seperti balai keyakinan yang berfungsi sebagai bukti bahwa multi keyakinan yang ada telah dibangun secara damai dan situs ini dapat menangkai secara simbolis kepada pihak-pihak yang berencana untuk meruntuhkan bangunan perdamaian yang sudah mentradisi. Sedangkan balai keyakinan sebagai media silaturahmi multi keyakinan dan sentral dalam menyelesaikan konflik keyakinan yang akan terjadi.
- 3) Mengadakan rapat tokoh masyarakat dalam rapat tersebut para tokoh membahas mengenai hal-hal tentang keagamaan dan tujuan yang akan dicapai oleh masyarakat serta upaya kemajuan desa.
- 4) Terjun ke masyarakat memberikan penyuluhan dan bimbingan untuk memberikan kesadaran pada masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang dapat mendatangkan aib dan cela terhadap diri, keluarga serta masyarakatnya.<sup>78</sup>

#### c. Fungsi Tokoh Agama

Peran penting para tokoh agama sangat dibutuhkan sebagai sarana media menguat keyakinan para penganut agama yang dianutnya. Peran tokoh agama setiap agama yang ada di Indonesia pada khususnya memiliki tanggung jawab besar dalam menguatkan ajarannya kepada umat.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Ahsanul Khalikin, "Pengembangan Wadah Kerukunan dan Ketahanan Masyarakat Lokal di Kecamatan Banjarmasin Tengah". *Harmoni*. Vol. 3. No. 2 (September 2017), h. 118.

<sup>79</sup> Elli M Stiadi, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 34.

Secara esensial paling tidak ada dua fungsi keagamaan yang cukup sentral dari tokoh agama.

1) Fungsi pemeliharaan ajaran agama

Makna dari fungsi pemeliharaan adalah bahwa tokoh agama memiliki hak dan wewenang untuk memimpin upacara-upacara keagamaan, di samping berfungsi sebagai penjaga kemurnian ajaran agamanya. Karena itu ia selalu mengajarkan ritual keagamaan secara benar dan berperilaku sesuai dengan ajarannya. Ia akan bereaksi dan mengoreksi bila terjadi penyimpangan.

2) Fungsi pengembangan ajaran agama

Fungsi pengembangan ajaran adalah bahwa mereka berupaya melakukan misi untuk menyiarkan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pemeluknya. Fungsi tokoh agama yang sedemikian strategis dan tugas-tugasnya yang amat penting membuat tokoh agama atau imam masjid harus memenuhi profil ideal.<sup>80</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa, tugas dan fungsi tokoh agama adalah dalam kehidupan masyarakat, tokoh agama mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pemeliharaan ajaran agama agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan, pengembangan ajaran agama agar meningkatkan kualitas dan kuantitas pemeluknya,

---

<sup>80</sup> Ronald, *Tokoh Agama Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 28.

dengan memberikan bimbingan agama Islam yang bertujuan untuk membimbing masyarakat agar memiliki nilai-nilai agama.

### 3. Tanggung Jawab Tokoh Agama

Tanggung jawab tokoh agama menurut Hamdan Rasyid di antaranya adalah sebagai berikut:

#### a. Melaksanakan *tabligh* dan dakwah untuk membimbing umat

Tokoh agama mempunyai kewajiban mengajar, mendidik dan membimbing umat manusia agar menjadi orang-orang yang beriman dan melaksanakan ajaran Islam.

#### b. Melaksanakan *amar ma`ruf nahi munkar*

Seorang tokoh agama harus melaksanakan amar ma`ruf dan nahi munkar, baik kepada rakyat kebanyakan (umat) maupun kepada para pejabat dan penguasa negara, terutama kepada para pemimpin, karena sikap dan perilaku mereka banyak berpengaruh terhadap masyarakat.

#### c. Memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat

Para tokoh agama harus konsekuen dalam melaksanakan ajaran Islam untuk diri mereka sendiri maupun keluarga, saudara-saudara, dan sanak familinya. Salah satu penyebab keberhasilan dakwah Rasulullah Saw, adalah karena beliau dapat dijadikan teladan bagi umatnya.

#### d. Memberikan penjelasan kepada masyarakat terhadap berbagai macam ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Para tokoh agama harus menjelaskan hal-hal tersebut agar dapat dijadikan pedoman dan rujukan dalam menjalani kehidupan.

- e. Tokoh agama harus bisa memberi keputusan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat secara adil berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.
- f. Membentuk orientasi kehidupan masyarakat yang bermoral dan berbudi luhur

Dengan demikian, nilai-nilai agama Islam dapat terinternalisasi dalam jiwa mereka, yang pada akhirnya mereka memiliki watak mandiri, karakter yang kuat dan terpuji, ketaatan dalam beragama, kedisiplinan dalam beribadah, serta menghormati sesama manusia. Jika masyarakat telah memiliki orientasi kehidupan yang bermoral, maka mereka akan mampu memfilter infiltrasi budaya asing dengan mengambil sisi positif dan membuang sisi negatif.

- g. Menjadi rahmat bagi seluruh alam

Yaitu terutama pada masa-masa kritis seperti ketika terjadi ketidakadilan, pelanggaran terhadap akhlak asasi manusia (HAM), bencana yang melanda manusia, perampokan, pencurian yang terjadi dimana-mana, pembunuhan, sehingga umatpun merasa diayomi, tenang, tenteram, bahagia, dan sejahtera di bawah bimbingannya.<sup>81</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab tokoh agama adalah bahwa ada beberapa tanggung jawab dari seorang tokoh agama diantaranya, melaksanakan tabligh dan dakwah untuk membimbing umat, melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*,

---

<sup>81</sup> Hamdan Rasyid, *Bimbingan Ulama Kepada Umara dan Umat* (Jakarta: Pustaka Beta, 2007), h. 22.



memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat, memberikan penjelasan kepada masyarakat terhadap berbagai macam ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah, memberikan Solusi bagi persoalan-persoalan umat, membentuk orientasi kehidupan masyarakat yang bermoral dan berbudi luhur dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

#### **E. Pemilihan Kepala Desa**

Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan peraturan daerah kabupaten/kota.<sup>82</sup> Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/ kota. Pemilihan kepala Desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, bupati/ walikota menunjuk penjabat kepala Desa. Penjabat kepala Desa berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.<sup>83</sup>

Pemilihan Kepala Desa secara serentak dilaksanakan melalui beberapa tahapan, menyebutkan pelaksanaan pemilihan kepala desa melalui tahapan Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara dan Penetapan.<sup>84</sup> Sebelum dilakukan pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa

---

<sup>82</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 31.

<sup>83</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 40

<sup>84</sup> Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tetang Pemilihan Kepala Desa Pasal 6

memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir. Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Panitia pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak. Panitia pemilihan Kepala Desa terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.<sup>85</sup>

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
8. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

---

<sup>85</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 32

yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

10. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Berbadan sehat;
12. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.<sup>86</sup>

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa, dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Panitia pemilihan bertugas mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.<sup>87</sup>

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Tahapan persiapan terdiri atas kegiatan:

---

<sup>86</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 33

<sup>87</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 34

1. Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
2. Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
3. Laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
4. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan. dan
5. Persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.<sup>88</sup>

Tahapan pencalonan terdiri atas kegiatan:

1. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
2. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari.
3. Penetapan calon kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon.
4. Penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa.

---

<sup>88</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 41 Ayat (1) dan (2)

5. Pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.
6. Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.<sup>89</sup>

Tahapan pemungutan suara terdiri atas kegiatan:

1. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
2. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.
3. Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.<sup>90</sup>

Tahapan penetapan terdiri atas kegiatan:

1. Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
2. Laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia.
3. Bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.
4. Bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan

---

<sup>89</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 41 Ayat (3)

<sup>90</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 41 Ayat (4)

pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>91</sup>

Pejabat lain yang ditunjuk adalah wakil bupati/walikota atau camat atau sebutan lain. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.<sup>92</sup>

Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. Dalam hal kepala Desa cuti, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa. Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. Dalam hal pegawai negeri sipil terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.<sup>93</sup>

Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. Tugas perangkat Desa dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.<sup>94</sup>

---

<sup>91</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 41 Ayat (5)

<sup>92</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 41 Ayat (6) dan (7)

<sup>93</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 42 dan 43

<sup>94</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 44

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme, Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:

1. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
2. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
4. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
5. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari.
6. Penetapan calon kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang

dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.<sup>95</sup>

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:

1. Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
2. Pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. Pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
4. Pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
5. Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
6. Pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
7. Pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;

---

<sup>95</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 45 Ayat 1



8. Penerbitan keputusan bupati/walikota tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
9. Pelantikan kepala Desa oleh bupati/walikota paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>96</sup>

Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih. Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa. Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>97</sup>

Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih. Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada

---

<sup>96</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 45 ayat (2)

<sup>97</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 35-36

Bupati/Walikota. Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu.

Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji. Sumpah/janji sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>98</sup>

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.<sup>99</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

Beberapa kajian yang pembahasannya memiliki kesamaan dengan skripsi yang penulis teliti, antara lain:

---

<sup>98</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 38

<sup>99</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 39

1. *Pengaruh Ulama Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Karaksaan (Studi kasus pada Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2008)*, diteliti oleh Muhammad Dafan Inanda, pada tahun 2009. Di dalam skripsi ini, penulis menjelaskan bahwa Pengaruh ulama terhadap masyarakat Kraksaan pada Pilkada Kabupaten Probolinggo tahun 2008 sangat tinggi. Data yang mendukung kesimpulan ini adalah mayoritas pilihan responden tentang siapakah tokoh yang paling didengar pendapatnya dalam masalah sosial, agama dan politik adalah ulama. Hal ini disebabkan karena ulama adalah seseorang yang berilmu dan orang yang dekat dengan Tuhan (ahli zikir) sehingga dapat memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Pengaruh ulama terhadap masyarakat Kraksaan sangat penting sebagai panutan agama dan ulama sebagai orang yang patut ditauladani juga sangat tinggi, akan tetapi pengaruh ulama semakin menurun atau tidak penting dalam panutan politik. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat Kraksaan yang tidak setuju mengenai pernyataan bahwa ulama perlu diikuti bukan hanya untuk masalah agama tetapi juga untuk masalah politik.<sup>100</sup>

2. *Peranan Tokoh Agama dalam Kehidupan Politik Penelitian di Desa Sumur kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal*, diteliti oleh Maria Ulfa pada tahun 2009. Di dalam skripsi ini, penulis menjelaskan bahwa Peran tokoh agama di desa Sumur sebenarnya dalam keadaan mendua yaitu sebagai tokoh politik dan sebagai tokoh agama, sebagai tokoh agama tokoh agama

---

<sup>100</sup> Muhammad Dafan Inanda, "Pengaruh Ulama Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Karaksaan (Studi kasus pada Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2008)". (Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, 2009), h. 83.

memberi pengajaran pada masyarakat yaitu melalui kegiatan keagamaan. Dalam bidang politik, terutama dalam penyuksesan Pilgub Jateng 2008 peran tokoh agama terlihat dalam kegiatan dengan kedok keagamaan seperti do'a bersama (*Istighostah*), kegiatan rutin Fatayat Muslimat NU seperti tahlil, manaqib, berzanji, dan yasinan. Dalam kegiatan keagamaan tersebut tokoh agama menyampaikan sosialisasi pasangan Cagub-Cawagub yang diusung oleh partai politik tertentu.<sup>101</sup>

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu bahwa Muhammad Dafan Inanda meneliti tentang pengaruh ulama terhadap partisipasi politik masyarakat Karaksaan pada Pilkada Kabupaten Probolinggo dan Maria Ulfa meneliti tentang peranan tokoh agama dalam kehidupan politik di Desa Sumur Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal pada pilkada Jawa Tengah, sementara penulis meneliti tentang analisis *fiqh siyasah* terhadap peran tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa di Kecamatan Baradatu.

---

<sup>101</sup> Maria Ulfa, "Peranan Tokoh Agama dalam Kehidupan Politik Penelitian di Desa Sumur kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal". (Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009), h. 86.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Semarang: Toha, 2003.

### Buku

A. Rahman, *Sistem Politik Indonesia* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Abdul Aziz Al-Badari, *Hitam Putih Wajah Ulama & Penguasa* Jakarta: Darul Falah, 2003.

Abdul Mun'im Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* Bandung: Bulan Bintang, 2003.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial* Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001.

Afan Gaffar, *Merangsang Partisipasi Politik Rakyat* Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2002.

Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, terjemahan Fathur Rahman dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam* Jakarta, Bulan Bintang: 2003.

Andi Faisal Bakti, *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi* Jakarta: Churia Press, 2012.

Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia* Surabaya: SIC, 2002.

Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam* Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Badruddin Subky, *Dilema Ulama dalam Perubahan Zaman* Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* Bandung: Pustaka Setia, 2015.

- Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)* Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2011.
- Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani* Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2000.
- Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiyai dan Kekuasaan* Yogyakarta: LKIS, 2004.
- Elli M Stiadi, *Pengantar Sosiologi* Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* Jakarta: Amzah, 2005.
- H.A. Djazuli, *Fiqh siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* Jakarta: Prenada media Group, 2014.
- H. M. Arifin Noor, *Ilmu Sosial Dasar* Bandung: Cv Pustaka Setia, 2002.
- Hamdan Rasyid, *Bimbingan Ulama Kepada Umara dan Umat* Jakarta: Pustaka Beta, 2007.
- Imam Bawani, *Cindernisasi Islam Dalam Perspektif Islam* Surabaya: Bina Firma, 2001.
- J. Dwi Narwoko, *Psikologi Sosial* Surabaya: PT Bina Ilmu , 2002.
- Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal Itu?* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Keith Faulks. *Sosiologi Politik* Bandung: Nusa Media, 2010.
- Koswara Kartapradja, *Otonomi Daerah, Untuk Demokrasi Dan Kemendirian Rakyat* Jakarta : PT. Candi Cipta Paramuda, 2002.
- M. Saleh Suhaidy dan Abubakar Al Yasa', *Buku Pegangan Teungku Imuem Meunasah* Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh Darussalam, 2008.
- Malik Bin Nabi, *Membangun Dunia Baru Islam* Bandung: Mizan, 2004.
- Mas'oed, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.

- Michael Rush dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* Jakarta: Erlangga, 2008.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2007.
- Ronald, *Tokoh Agama Dalam Masyarakat* Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang* Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam* Jakarta: Amzah, Cet. Ke-3, 2013.
- Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2002.
- Sarliti Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sayyid Muhammad Musa, *Al-Ijtihad Wa Mada Hajatina Ilaihfi Haza Al-Ashr Mishar*: Dar Al-Kutub Al-Hadisah, 2003.
- Shabri dan Sudirman, *Biografi Ulama-Ulama Aceh Abad XX* Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001.
- Suhar Arikunto, *Prosedur Penelitian Suratan Pendekatan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006.



- Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik* Semarang: Ikip Semarang Press, 2005.
- Sugiono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung, Alfabeta, 2011.
- Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.
- Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam, Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani, dan Demokrasi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- T. M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* Jakarta, Bulan: 2004.
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- W. J. S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: PN Balai Pustaka, 2004.
- Yalvema Miaz, *Partisipasi Politik* Jakarta: UNP Press, 2004
- Yowono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* Surabaya: Arkolis, 2000.
- Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan* Bandung: Bulan Bintang, 2003.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Grafik Grafika Cetakan Ke 3,

## **Jurnal**

- Ahsanul Khalikin, "Pengembangan Wadah Kerukunan dan Ketahanan Masyarakat Lokal di Kecamatan Banjarmasin Tengah". *Harmoni*. Vol. 3. No. 2 (September 2017).
- Fitri Anisa, "Kontruksi Perdamian Dalam Relasi Islam-Katolik-Sunda di Kali Minggir dan Naga Herang", *Harmoni dalam keragaman*. Vol. 4. No. 3. (Juli 2012).
- Mohammad Rusfi, AL-'ADALAH, *Validitas Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum*, Vol. XII, No 1. Juni 2014, h. 67. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah>, diakses pada tanggal 01 Februari 2020.

**Sumber On-Line**

Ahmad Sahal Hasan, “Partisipasi Politik” (On-Line), tersedia di:  
<http://www.dakwatuna.com/2014/03/20/48095/partisipasi-politik/amp/> (04 Februari 2020).

Sukses Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Fiqh Siyasah” (On-Line), Tersedia di:<http://digilib.uinsby.ac.id/966/5/Bab%202.pdf> (02 Februari 2020).